



RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO SELATAN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas peran serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Barito Selatan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, stakeholder terkait, maupun masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan



Drs. SABIRIN, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199012 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	15
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
3.1 Tujuan dan Sasaran	22
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	25
4.1 Uraian Program	25
4.2 Uraian Kegiatan	25
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	26
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	58
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	59
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	9
Tabel	2.2	Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan	9
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Jabatan	10
Tabel	2.5	Capaian Perekaman KTP-el Kabupaten Barito Selatan Semester II Tahun 2024	13
Tabel	2.6	Capaian Kepemilikan Akta Lahir Anak dan KIA Semester II Tahun 2024	13
Tabel	2.7	Rekapitulasi Capaian dan Realisasi Belanja Dinas Dukcapil Tahun 2024	15
Tabel	2.8	Permasalahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	22
Tabel	3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	23
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	27
Tabel	4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	29
Tabel	4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	42
Tabel	4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	57

Tabel	4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	58
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029	59

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	8
Gambar	2.2	Capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Tahun 2024	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pelayanan ini mencakup penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, serta berbagai layanan lainnya yang menjadi dasar legalitas identitas dan status hukum penduduk.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, yang menjadi kerangka kerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selama periode sebelumnya (2020–2024), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta upaya jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terbatasnya aksesibilitas layanan di daerah pedesaan dan perbatasan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur layanan.

Memasuki periode 2025–2029, transformasi pelayanan publik yang berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta integrasi layanan dengan instansi lain menjadi fokus utama yang harus dioptimalkan. Selain itu, dinamika sosial, ekonomi, dan politik, termasuk target nasional terkait Satu Data Kependudukan, menuntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan dan strategi yang jelas, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inklusif, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Selatan secara menyeluruh;
2. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Administrasi Kependudukan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan;
- d) Pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f) Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

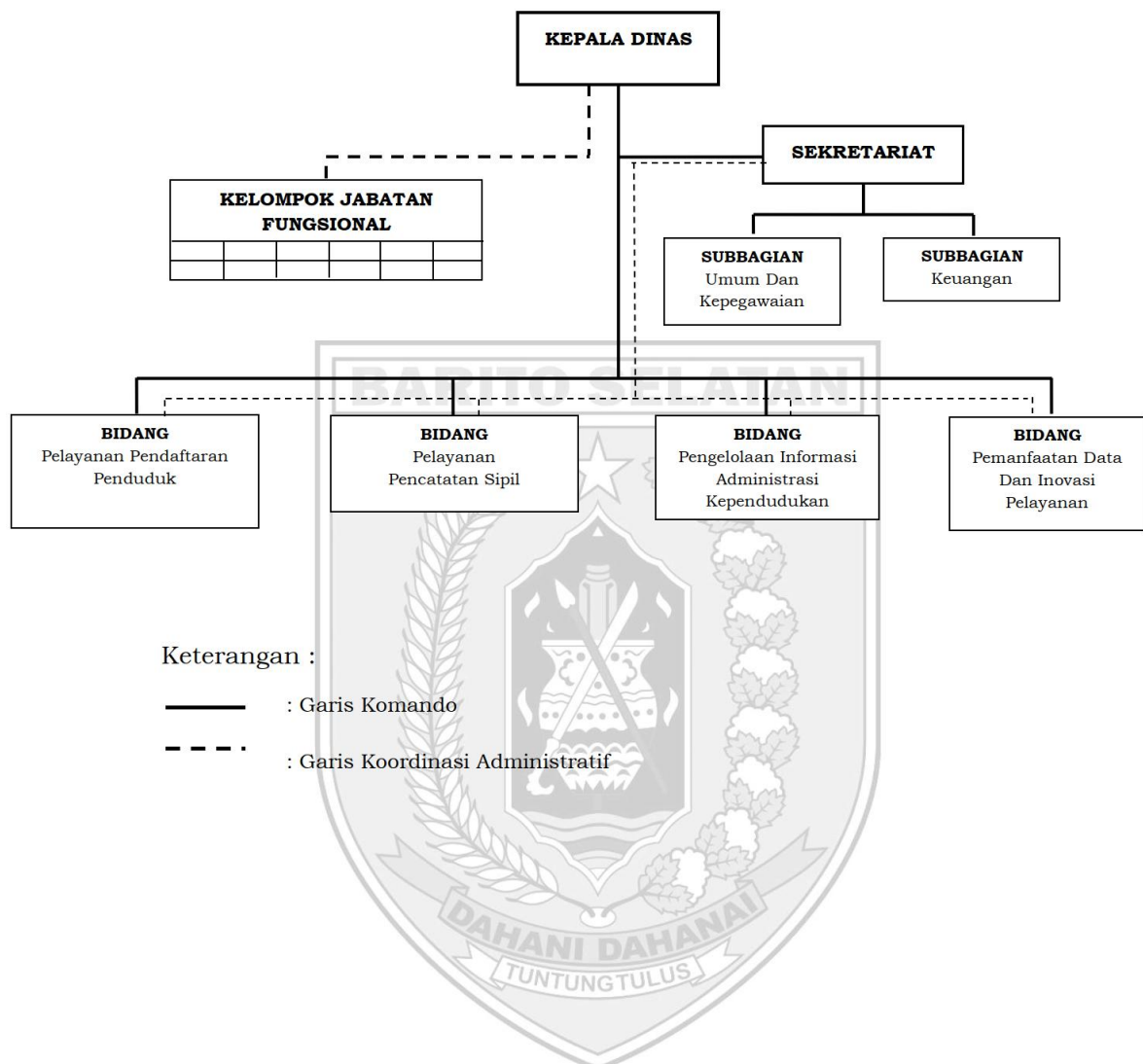
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas ;
- b) Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu keberhasilan. Gambaran jumlah pegawai, komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, kualifikasi pendidikan, serta jabatan struktural dan fungsional yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan (keadaan per 31 Agustus 2025) dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	25 orang
2.	PPPK	7 orang
3.	Honorer (Tenaga Kontrak)	6 orang
	J u m l a h	38 orang

Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan :

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
5.	Pembina	IV/a	4 orang
6.	Penata Tingkat I	III/d	9 orang
7.	Penata	III/c	1 orang
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 orang
9.	Penata Muda	III/a	4 orang
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
11.	Pengatur	II/c	-
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	1 orang
14.	Juru Tingkat I	I/d	-
15.	Juru	I/c	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
17.	Juru Muda	I/a	-
	J u m l a h		25 orang

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	7 orang
3.	Sarjana (S1)	20 orang
4.	Diploma III	-
5.	SLTA sederajat	10 orang
6.	SLTP sederajat	1 orang
7.	SD sederajat	-
	J u m l a h	38 orang

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Kedudukan Dalam Jabatan :

No.	Jenis Jabatan / Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II.b	1 orang
2.	Eselon III.a	1 orang
3.	Eselon III.b	3 orang
4.	Eselon IV.a	1 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	6 orang
6.	Jabatan Pelaksana (JFU)	26 orang
	J u m l a h	38 orang

Disamping SDM internal yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana rincian di atas, terdapat juga SDM pendukung tugas fungsional yang berada di luar Dinas Dukcapil Kab. Barito Selatan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam kelompok ini adalah tenaga fungsional yang diangkat dan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas fungsional pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu :

- 1) Tenaga operator perekaman KTP-el untuk operasionalisasi peralatan SIAK dan pelayanan perekaman KTP-el di Kantor Kecamatan, sebanyak 12 (dua belas) orang yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan (2 orang operator per kecamatan), dan
- 2) Petugas Register Desa/Kelurahan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang tersebar di 86 Desa dan 7 Kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan.

b. Sarana dan Prasarana (asset)

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana juga merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun Sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung kinerja operasional pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini (keadaan per 31 Agustus 2025) sudah cukup lengkap, antara lain seperti :

a) Jumlah Aset Tetap (Tanah)

No.	Jenis Aset	Luas	Keterangan
1.	Tanah Kantor	1.733 M ²	Tanah Bangunan Tempat Kerja
2.	Tanah Halaman Kantor	657 M ²	Tanah Bangunan Tempat Kerja

b) Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Alat-alat Angkutan	21 Unit	Kendaraan Dinas dan Operasional
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	82 Unit	ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), Mesin CCTV, AC, Televisi, Mebel dan Alat Rumah Tangga Lainnya
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	8 Unit	LCD, Faximile, Mesin Cetak KTP, Kamera dan Alat Studio Lainnya
4.	Perangkat Komputer	77 Unit	Komputer, Laptop dan Printer

c) Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Aset	Luas	Keterangan
1.	Gedung Kantor I Disdukcapil Kab.Barito Selatan	324 M ²	Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.	Gedung Kantor II Disdukcapil Kab.Barito Selatan (sekretariat)	186 M ²	Bangunan Gedung Tempat Kerja
3.	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (parkir)	324 M ²	Bangunan Gedung Tempat Kerja
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	324 M ²	Bangunan Gedung Tempat Kerja

d) Jumlah Aset Jaringan dan Instalasi

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tower Tandon	1	Bangunan Air Bersih
2.	Instalasi Listrik	20.000 VA	Daya Listrik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja pelayanan adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada akhir periode Renstra sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) secara garis besar dapat dilihat dari realisasi capaian indikator kinerja utama dan realisasi capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Adminduk Tahun 2024 berikut:

Tabel 2.5. Capaian Perekaman KTP-el Kabupaten Barito Selatan Semester II Tahun 2024

**JUMLAH PENDUDUK, WKTP DAN CAPAIAN PEREKAMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
SEMESTER II TAHUN 2024**



No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JLH WKTP	SUDAH REKAM	%	BELUM REKAM
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH				
1	JENAMAS	4.550	4.358	8.908	6.462	6.321	97,82	141
2	DUSUN HILIR	8.543	7.918	16.461	12.050	11.813	98,03	237
3	KARAU KUALA	8.073	7.687	15.760	11.788	11.552	98,00	236
4	DUSUN UTARA	8.870	8.220	17.090	12.746	12.427	97,50	319
5	GUNUNG BINTANG AWAI	10.395	9.769	20.164	14.716	14.368	97,64	348
6	DUSUN SELATAN	30.191	29.340	59.531	43.333	42.669	98,47	664
JUMLAH		70.622	67.292	137.914	101.095	99.150	98,08	1.945

Tabel 2.6. Capaian Kepemilikan Akta Lahir Anak dan KIA Semester II Tahun 2024

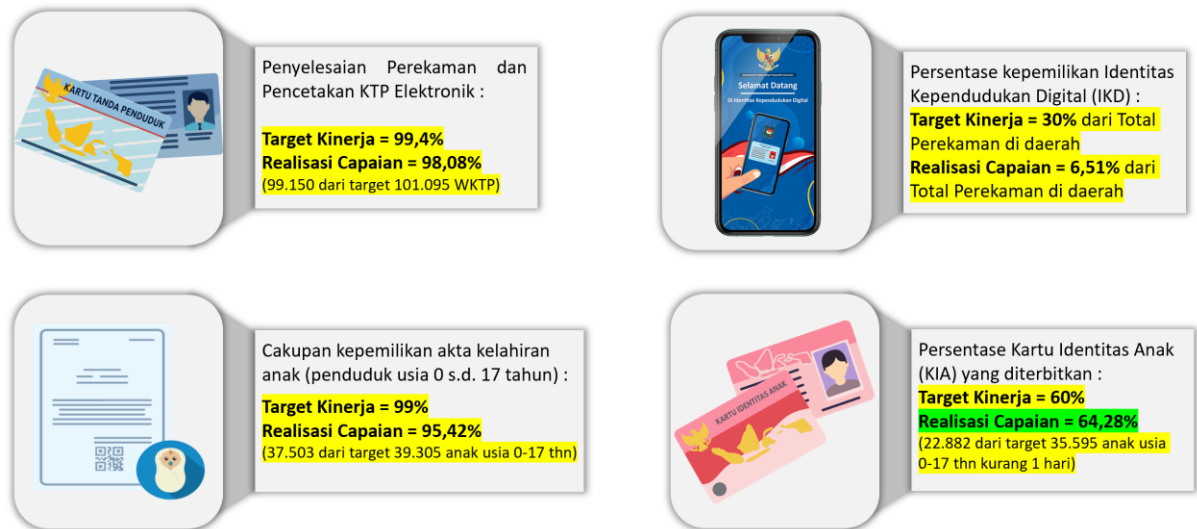
**JUMLAH TARGET DAN CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR ANAK DAN KIA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
SEMESTER II TAHUN 2024**



No.	KECAMATAN	JUMLAH TARGET DAN CAPAIAN AKTA LAHIR ANAK				JUMLAH TARGET DAN CAPAIAN KEPEMILIKAN KIA			
		WAJIB AKTA	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	% KEPEMILIKAN	WAJIB KIA	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	% KEPEMILIKAN
1	JENAMAS	2.604	2.423	181	93,05	2.348	1.250	1.125	53,24
2	DUSUN HILIR	4.700	4.421	279	94,06	4.286	2.109	2.238	49,21
3	KARAU KUALA	4.269	3.998	271	93,65	3.842	1.857	2.038	48,33
4	DUSUN UTARA	4.689	4.476	213	95,46	4.180	2.852	1.374	68,23
5	GUNUNG BINTANG AWAI	5.796	5.458	338	94,17	5.229	3.395	1.900	64,93
6	DUSUN SELATAN	17.247	16.727	520	96,98	15.710	11.419	4.541	72,69
JUMLAH		39.305	37.503	1.802	95,42	35.595	22.882	13.216	64,28

Gambar 2.2. Capaian kinerja berdasarkan Target Nasional Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL KAB. BARSEL BERDASARKAN TARGET NASIONAL TAHUN 2024



Dari pencapaian kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Target Kinerja Nasional bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2024 di atas, hanya satu indikator kinerja utama yang capaiannya masih rendah yaitu Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hanya mencapai 6,51% dari target sebesar 30%. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja utama lainnya rata-rata hampir mencapai target, bahkan salah satu indikator kinerja utama yaitu Cakupan Kepemilikan KIA sudah melebihi target dengan realisasi capaian sebesar 64,28% dari target kinerja sebesar 60%.

b. Kinerja Anggaran

Dari segi pengelolaan pendanaan / anggaran, pencapaian kinerja pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada akhir periode Renstra sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7. Rekapitulasi Capaian dan Realisasi Belanja Dinas Dukcapil Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	3.236.284.353,00	2.744.893.975,00	84,82
2	Belanja Barang dan Jasa	3.871.360.616,00	3.621.827.986,00	93,55
3	Belanja Modal	976.485.000,00	915.780.000,00	93,78
	TOTAL BELANJA	8.084.129.969,00	7.282.501.961,00	90,08

Dari tabel di atas, capaian realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar 90,08 %.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Untuk menjamin layanan administrasi kependudukan yang inklusif, adil, dan merata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

a. Penduduk

Seluruh penduduk menjadi sasaran layanan, baik penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan maupun penduduk luar domisili yang memerlukan layanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan. Mengingat layanan adminduk walaupun bukan merupakan pelayanan dasar tetapi menjadi dasar dari semua pelayanan.

b. Perangkat Daerah

Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan juga memberikan layanan data kependudukan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selaku pengguna data.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Dinas Dukcapil Kabupaten

Barito Selatan dalam memberikan pelayanan bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Barito Selatan, seperti:

- Dinas Kesehatan, dalam rangka mewujudkan layanan terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan di Kab. Barito Selatan untuk memberikan kemudahan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir di Rumah Sakit, Pustu dan Puskesmas;
- Dinas Pendidikan, dalam rangka mewajibkan KIA sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah, serta melibatkan pihak sekolah untuk pro aktif memfasilitasi pembuatan KIA bagi siswa;
- Kemenag Barito Selatan, dalam rangka mewujudkan layanan terintegrasi dengan KUA se- Kab. Barito Selatan untuk memberikan kemudahan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan perubahan kepada calon pengantin/catin yang sudah mendaftar di KUA;
- Pengadilan Agama (PA) Barito Selatan, dalam rangka fasilitasi pelaksanaan Sidang Istbat Nikah keliling bagi pasangan muslim yang belum memiliki Buku Nikah (status perkawinan belum tercatat);
- Pengadilan Negeri (PN) Barito Selatan, dalam rangka fasilitasi pelaksanaan sidang pencatatan perkawinan/perceraian secara keliling (di tempat) bagi pasangan non muslim yang perkawinan/perceraiannya belum tercatat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta kondisi teraktual penyelenggaraan pelayanan saat ini, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana hasil pemetaan permasalahan pada Tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8. Permasalahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1	Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai	Keterbatasan Anggaran dan Prioritas - Alokasi dana untuk pembangunan/peningkatan sarana gedung pelayanan, pengadaan mobil pelayanan keliling dan perangkat/peralatan pelayanan adminduk tidak mencukupi atau tidak menjadi prioritas. Perencanaan dan Manajemen Aset yang Lemah - Tidak ada peta kebutuhan infrastruktur yang komprehensif. - Pemeliharaan sarana yang ada kurang terjadwal, sehingga cepat rusak/tertinggal. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Layanan Lebih Cepat dari Peningkatan Sarana - Permintaan layanan (pencatatan kelahiran, KTP elektronik, dll.) meningkat pesat sehingga infrastruktur yang ada tidak lagi memadai.
2	Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Kapasitas dan kompetensi petugas terbatas, khususnya dalam penguasaan IT dan pelayanan prima. Pemanfaatan fasilitas pelayanan <i>online</i>/berbasis digital belum optimal, (Kebiasaan masyarakat pengguna layanan yang masih senang berurusan secara konvensional, masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi) Pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh lembaga/OPD pengguna belum optimal (integrasi data kependudukan dengan instansi penyedia layanan publik lainnya masih belum terlaksana/belum optimal). Konektivitas jaringan di pelosok desa masih terbatas, masih ada desa yang <i>blindspot</i> menyebabkan proses layanan jemput bola terhambat dan tidak real time, masyarakat tidak bisa menggunakan layanan <i>online</i>. Data kebutuhan masyarakat tidak terpetakan secara baik; misalnya kelompok rentan, warga di daerah terpencil, atau kebutuhan layanan khusus belum terakomodir.

3.	Kesadaran/ inisiatif masyarakat untuk secara aktif melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian secara tepat waktu masih rendah.	1. Faktor Pengetahuan & Pemahaman • Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban serta manfaat pelaporan peristiwa kependudukan. • Informasi layanan tidak mudah diakses (minim media informasi, bahasa teknis sulit dipahami). 2. Faktor Akses & Infrastruktur Layanan • Lokasi layanan jauh atau terbatas bagi masyarakat di wilayah terpencil. • Jam layanan tidak fleksibel, menyulitkan warga yang bekerja atau memiliki mobilitas terbatas. • Keterbatasan teknologi daring (aplikasi tidak ramah pengguna, tidak ada konektivitas jaringan internet/ jaringan internet lemah). 3. Faktor Kualitas Layanan • Proses berbelit atau memakan waktu lama, menurunkan minat masyarakat. • Kurang responsif terhadap kebutuhan khusus (penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat). 4. Faktor Penegakan Aturan • Tidak ada sanksi jelas yang mendorong pelaporan tepat waktu. • Pengawasan lemah, sehingga keterlambatan tidak menimbulkan konsekuensi nyata.
----	---	--

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Penentuan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025- 2029 di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pemetaan permasalahan. Isu strategis sangat penting sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, untuk memastikan pembangunan sesuai dengan konteks global, nasional, dan regional. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan isu- isu strategis yang memiliki dampak signifikan bagi daerah. Adapun Isu Strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi layanan administrasi kependudukan melalui penguatan infrastruktur digital dan akses komunikasi yang merata.

Dalam era digital saat ini, pelayanan administrasi kependudukan yang efektif sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, listrik, serta perangkat teknologi yang memadai. Namun, di sejumlah wilayah Kabupaten Barito Selatan, infrastruktur tersebut masih belum merata sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelayanan. Untuk itu, diperlukan strategi optimalisasi layanan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke desa-desa terpencil, agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara mudah dan setara.

b. Peningkatan jangkauan pelayanan adminduk berbasis wilayah melalui layanan mobile dan jemput bola.

Kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan yang cukup luas dan terdiri dari wilayah-wilayah yang sulit dijangkau membuat sebagian masyarakat kesulitan datang langsung ke kantor Dukcapil. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel dan menjangkau langsung masyarakat, seperti layanan jemput bola, mobil pelayanan keliling, dan kerja sama dengan pemerintah desa. Strategi ini merupakan bagian penting dari upaya memperluas akses pelayanan publik serta menjamin hak setiap warga negara atas dokumen kependudukan.

c. Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM Dukcapil dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan prima.

Transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis digital dan teknologi informasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, responsif, dan profesional. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam kualitas SDM, baik dari sisi penguasaan sistem informasi maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, peningkatan literasi digital, serta pembinaan integritas menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan kependudukan dapat berjalan secara optimal dan adaptif terhadap perubahan.

d. Perluasan akses dan pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan untuk mendukung inklusi sosial dan perlindungan warga negara.

Masih banyak masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, maupun KTP-el. Hal ini menyebabkan mereka tidak tercatat secara resmi dalam sistem kependudukan dan rentan terhadap eksklusi sosial, seperti tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Maka dari itu, isu strategis ini menekankan pentingnya pemerataan layanan dan kepemilikan dokumen bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

e. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan kewajiban administrasi kependudukan.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sering menjadi penyebab tidak dilaksanakannya pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, maupun perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan literasi masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kesadaran bahwa administrasi kependudukan adalah hak sekaligus kewajiban yang penting untuk diurus dan dijaga.

f. Peningkatan pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh pengguna sebagai dasar pemberian layanan publik.

Pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh berbagai penyelenggara layanan publik sebagai dasar legal dan kepastian identitas yang memberi jaminan bahwa layanan publik yang diberikan (bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perizinan) tepat sasaran dan hanya diberikan kepada penduduk yang berhak, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi rujukan tunggal untuk memverifikasi identitas penduduk, sehingga berdampak terhadap efisiensi dan integrasi layanan.

g. Peningkatan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar kebijakan dan pelayanan publik.

Data kependudukan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Ketidakakuratan atau keterlambatan pemutakhiran data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan sistem pemutakhiran data, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan menjadi prioritas strategis untuk menjamin bahwa data yang dikelola oleh Dukcapil benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	A	A	A	A	A	A	
2. Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat										

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah adalah rumusan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mencakup visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dimana Strategi adalah serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, dan Arah

kebijakan membantu dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Tahunan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan jangka panjang. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA			
MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK			
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi.	1. Digitalisasi dan perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	1.1. Pengembangan dan penerapan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital/online 1.2. Perluasan jangkauan layanan adminduk melalui pelayanan mobile/keliling dan pelayanan di desa.

		2. Pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	2.1. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan. 2.2. Pengembangan jenis dan model inovasi pelayanan dengan melakukan replikasi inovasi dari daerah lain.
		3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara layanan adminduk	3.1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis aparatur adminduk secara berkala. 3.2. Penerapan sistem evaluasi dan penghargaan terhadap kinerja petugas pelayanan.
		4. Integrasi layanan administrasi kependudukan dengan instansi/lembaga lain	4.1. Peningkatan kerja sama layanan administrasi kependudukan terintegrasi dengan lembaga/OPD pelayanan publik lainnya 4.2. Peningkatan kerja sama akses pemanfaatan data dengan lembaga/OPD pengguna

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan merencanakan 5 Program kegiatan yaitu;

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.2. Uraian Kegiatan

Untuk melaksanakan 5 Program di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan merencanakan 17 kegiatan yaitu;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
12. Pelayanan Pencatatan Sipil
13. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
14. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

17. Penyusunan Profil Kependudukan

4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan dan subkegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Uraian Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ADMINISTRASI KEBUDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01 - PROGRAM PENJUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota		0	0	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	64,28	64,50	65	346.662.700,00	68	346.662.700,00	70	346.662.700,00	72	346.662.700,00	75	346.662.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase KTP elektronik (%)	98,08	98,30	98,50		98,80		99		99,30		99,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	389.999.910,00	100	5.176.623.621,00	100	4.457.813.375,00	100	4.931.509.725,00	100	5.052.910.879,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	95,42	96	96,50		97		97,50		98		98,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	56,63	57	57,30		57,80		58,30		59		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta pemecatan pada semua individu pasangan yang pemecatannya dilaporkan (%)	62,79	63	63,20		63,40		63,70		63,90		64,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI														
					500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.175.775.220,00		10.962.398.931,00		10.243.598.685,00		10.717.285.035,00		10.838.686.189,00					
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00					
Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota		0	0	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					346.662.700,00		346.662.700,00		346.662.700,00		346.662.700,00		346.662.700,00					
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	64,28	64,50	65	346.662.700,00	68	346.662.700,00	70	346.662.700,00	72	346.662.700,00	75	346.662.700,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
	Persentase KTP elektronik (%)	98,08	98,30	98,50		98,80		99		99,30		99,80			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					389.999.910,00		5.176.623.621,00		4.457.813.375,00		4.931.509.725,00		5.052.910.879,00					
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diberikan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	389.999.910,00	100	5.176.623.621,00	100	4.457.813.375,00	100	4.931.509.725,00	100	5.052.910.879,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	95,42	96	96,50		97		97,50		98		98,50			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	56,63	57	57,30		57,80		58,30		59		60			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraian dilaporkan (%)	62,79	63	63,20		63,40		63,70		63,90		64,20			Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
2.12.04 - PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI ADMINISTRASI					500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00					

Dan berikut berupa uraian tentang teknik merumuskan program , kegiatan , subkegiatan rancangan akhir RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program , Kegiatan , Subkegiatan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital	Meningkatnya kepercayaan, Efisiensi dan Kemudahan Terhadap Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Nilai)		
					Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah, (Angka)		
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
					Nilai SAKIP PERANGKAT DAERAH (Nilai)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedia Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.12.01.2.02.0002 - Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.12.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.12.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03.0007 - Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.12.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase KIP elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Tersedianya Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase KTP elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftran Penduduk	
					Tersedianya Pendaftran Penduduk	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase cakupan kepemilikan akta cerai/raian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberian Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
						2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyalinan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyalinan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyalinan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyalinan Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
					Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2 : URUSAN PEMERINTAHAN KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN KEPENDIDIKAN				6.175.715.220,00		10.962.398.931,00		10.243.588.685,00		10.717.285.035,00		10.838.686.189,00		
1.2.01 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KADAPATEWAJOTA				4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		4.853.256.960,00		
NILAI SALDO PERANGKAT DAERAH (Nial)		0	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	0	4.853.256.960,00	2.120.000.000,00-0100-00-DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENGANTARAN KEPENDIDIKAN SIPIL	
1.2.01.01 : Pemecanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				206.226.400,00		206.226.400,00		206.226.400,00		206.226.400,00		206.226.400,00		
Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	2	206.226.400,00	2	206.226.400,00	2	206.226.400,00	2	206.226.400,00	2	206.226.400,00		
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		2	2		2		2		2		2			
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		8	8		8		8		8		8			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		12	12		12		12		12		12			
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		12	12		12		12		12		12			
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		2	2		2		2		2		2			
Jumlah Dokumen Pemecanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		3	3		3		3		3		3			
1.2.01.01.01 : Penyusunan Dokumen Pemecanaan Perangkat Daerah				4.899.800,00		4.899.800,00		4.899.800,00		4.899.800,00		4.899.800,00		
Jumlah Dokumen Pemecanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		3	3	4.899.800,00	3	4.899.800,00	3	4.899.800,00	3	4.899.800,00	3	4.899.800,00		
1.2.01.01.01.0002 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		8	8	3.100.000,00	8	3.100.000,00	8	3.100.000,00	8	3.100.000,00	8	3.100.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027			2028			2029				
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.099.800,00		2.099.800,00		2.099.800,00		2.099.800,00		2.099.800,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2.099.800,00	2	2.099.800,00	2	2.099.800,00	2	2.099.800,00	2	2.099.800,00				
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.999.900,00		2.999.900,00		2.999.900,00		2.999.900,00		2.999.900,00				
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2.999.900,00	2	2.999.900,00	2	2.999.900,00	2	2.999.900,00	2	2.999.900,00				
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00				
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				29.997.900,00		29.997.900,00		29.997.900,00		29.997.900,00		29.997.900,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	12	29.997.900,00	12	29.997.900,00	12	29.997.900,00	12	29.997.900,00	12	29.997.900,00				
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				160.629.000,00		160.629.000,00		160.629.000,00		160.629.000,00		160.629.000,00				
Teraksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	160.629.000,00	12	160.629.000,00	12	160.629.000,00	12	160.629.000,00	12	160.629.000,00				
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.094.671.156,00		3.094.671.156,00		3.094.671.156,00		3.094.671.156,00		3.094.671.156,00				
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00				
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00	12	3.094.671.156,00				
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	404	404	404		404		404		404		404					
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.945.907.006,00		2.945.907.006,00		2.945.907.006,00		2.945.907.006,00		2.945.907.006,00				
				</												



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	404	404	2.945.907.006,00	404	2.945.907.006,00	404	2.945.907.006,00	404	2.945.907.006,00	404	2.945.907.006,00						
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	123.240.000,00	12	123.240.000,00	12	123.240.000,00	12	123.240.000,00	12	123.240.000,00						
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.999.900,00				3.999.900,00				3.999.900,00						
Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	3.999.900,00	12	3.999.900,00	12	3.999.900,00	12	3.999.900,00	12	3.999.900,00						
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.500.000,00				4.500.000,00				4.500.000,00						
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00						
2.12.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.024.000,00				2.024.000,00				2.024.000,00						
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan (Dokumen)	12	12	2.024.000,00	12	2.024.000,00	12	2.024.000,00	12	2.024.000,00	12	2.024.000,00						
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.250,00				15.000.250,00				15.000.250,00						
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	15.000.250,00	12	15.000.250,00	12	15.000.250,00	12	15.000.250,00	12	15.000.250,00						
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.505.100,00				18.505.100,00				18.505.100,00						
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	18.505.100,00	12	18.505.100,00	12	18.505.100,00	12	18.505.100,00	12	18.505.100,00						
	Jumlah Rencana Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12							
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12							
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3							
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kelembutan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000,00				2.000.000,00				2.000.000,00						
				2.000.000,00				2.000.000,00				2.000.000,00						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2.000.000,00				
2.12.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	3	3	3.005.500,00	3	3.005.500,00	3	3.005.500,00	3	3.005.500,00	3	3.005.500,00	3	3.005.500,00	3.005.500,00				
2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	5.000.000,00				
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	5.999.400,00	12	5.999.400,00	12	5.999.400,00	12	5.999.400,00	12	5.999.400,00	12	5.999.400,00	5.999.400,00				
2.12.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	2.500.200,00	12	2.500.200,00	12	2.500.200,00	12	2.500.200,00	12	2.500.200,00	12	2.500.200,00	2.500.200,00				
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	114.300.000,00	1	114.300.000,00	1	114.300.000,00	1	114.300.000,00	1	114.300.000,00	1	114.300.000,00	114.300.000,00				
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	32.250.000,00	1	32.250.000,00	1	32.250.000,00	1	32.250.000,00	1	32.250.000,00	1	32.250.000,00	32.250.000,00				
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	3.500.000,00				
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	2.500.000,00				
				76.050.000,00		76.050.000,00		76.050.000,00		76.050.000,00		76.050.000,00		76.050.000,00	76.050.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Terkaitnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90	90	76.050.000,00	90	76.050.000,00	90	76.050.000,00	90	76.050.000,00	90	76.050.000,00	90	76.050.000,00				
				882.428.190,00		882.428.190,00		882.428.190,00		882.428.190,00		882.428.190,00		882.428.190,00				
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	882.428.190,00	12	882.428.190,00	12	882.428.190,00	12	882.428.190,00	12	882.428.190,00	12	882.428.190,00				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6		6		6		6		6		6					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1					
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				8.404.000,00		8.404.000,00		8.404.000,00		8.404.000,00		8.404.000,00		8.404.000,00				
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.404.000,00	1	8.404.000,00	1	8.404.000,00	1	8.404.000,00	1	8.404.000,00	1	8.404.000,00				
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				251.991.000,00		251.991.000,00		251.991.000,00		251.991.000,00		251.991.000,00		251.991.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	251.991.000,00	3	251.991.000,00	3	251.991.000,00	3	251.991.000,00	3	251.991.000,00	3	251.991.000,00				
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00				
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.556.950,00		61.556.950,00		61.556.950,00		61.556.950,00		61.556.950,00		61.556.950,00				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	61.556.950,00	1	61.556.950,00	1	61.556.950,00	1	61.556.950,00	1	61.556.950,00	1	61.556.950,00				
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.155.800,00		13.155.800,00		13.155.800,00		13.155.800,00		13.155.800,00		13.155.800,00				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	13.155.800,00	1	13.155.800,00	1	13.155.800,00	1	13.155.800,00	1	13.155.800,00	1	13.155.800,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00				
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00				
2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.301.440,00		10.301.440,00		10.301.440,00		10.301.440,00		10.301.440,00				
Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	1	10.301.440,00	1	10.301.440,00	1	10.301.440,00	1	10.301.440,00	1	10.301.440,00				
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamn				23.915.000,00		23.915.000,00		23.915.000,00		23.915.000,00		23.915.000,00				
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamn		6	6	23.915.000,00	6	23.915.000,00	6	23.915.000,00	6	23.915.000,00	6	23.915.000,00				
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				351.876.000,00		351.876.000,00		351.876.000,00		351.876.000,00		351.876.000,00				
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	351.876.000,00	12	351.876.000,00	12	351.876.000,00	12	351.876.000,00	12	351.876.000,00				
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD				157.728.000,00		157.728.000,00		157.728.000,00		157.728.000,00		157.728.000,00				
Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD		12	12	157.728.000,00	12	157.728.000,00	12	157.728.000,00	12	157.728.000,00	12	157.728.000,00				
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00				
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0,00			0,00			0,00			0,00						
		12	12	0,00	12		0,00	12		0,00	12		0,00						
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00			0,00			0,00			0,00						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00						
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0			0			0			0						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0			0			0			0						
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.645.464,00			265.645.464,00			265.645.464,00			265.645.464,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	265.645.464,00	12		265.645.464,00	12		265.645.464,00	12		265.645.464,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12						12								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12						12								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	150	150		150						150								
				3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12		3.000.000,00	12		3.000.000,00	12		3.000.000,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			183.884.664,00			183.884.664,00			183.884.664,00			183.884.664,00						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	183.884.664,00	12		183.884.664,00	12		183.884.664,00	12		183.884.664,00						
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.160.800,00			3.160.800,00			3.160.800,00			3.160.800,00						
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.160.800,00	12		3.160.800,00	12		3.160.800,00	12		3.160.800,00						
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				75.600.000,00			75.600.000,00			75.600.000,00			75.600.000,00						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	150	150	75.600.000,00	150		75.600.000,00	150		75.600.000,00	150		75.600.000,00						
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271.480.650,00			271.480.650,00			271.480.650,00			271.480.650,00						
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			271.480.650,00			271.480.650,00			271.480.650,00			271.480.650,00						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1							
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)																	
	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				31.553.600,00		31.553.600,00		31.553.600,00		31.553.600,00		31.553.600,00					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2		31.553.600,00	2	31.553.600,00	2	31.553.600,00	2	31.553.600,00	2	31.553.600,00					
	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105.410.000,00		105.410.000,00		105.410.000,00		105.410.000,00		105.410.000,00					
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2		105.410.000,00	2	105.410.000,00	2	105.410.000,00	2	105.410.000,00	2	105.410.000,00					
	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.150.000,00		25.150.000,00		25.150.000,00		25.150.000,00		25.150.000,00					
	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	15		25.150.000,00	15	25.150.000,00	15	25.150.000,00	15	25.150.000,00	15	25.150.000,00					
	2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0					
	Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0					
2.12.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0						
Tersedianya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0						
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00						
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0		0	0	0	0	0	0				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelestar/Direhabilitasi (Unit)			0	0		0	0	0	0	0	0				
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.367.050,00	9.367.050,00		9.367.050,00	9.367.050,00		9.367.050,00	9.367.050,00	9.367.050,00				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelestar/Direhabilitasi (Unit)	2	2	9.367.050,00	2	9.367.050,00	2	9.367.050,00	2	9.367.050,00	2	9.367.050,00				
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				346.662.700,00	346.662.700,00		346.662.700,00	346.662.700,00		346.662.700,00	346.662.700,00	346.662.700,00				
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kejemputan Kartu Identitas Anak (Persentase)	64,28	65	346.662.700,00	68	346.662.700,00	70	346.662.700,00	72	346.662.700,00	75	346.662.700,00	2.12.02.02.01.0002 - Pencatatan, 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDICATAN SIPIL			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	98,08	98,50		98,80		99		99,30		99,80					
Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.000	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00				
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				248.187.400,00		248.187.400,00		248.187.400,00		248.187.400,00		248.187.400,00				
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.000	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00	2.000	248.187.400,00				
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tersedianya Pendaftaran Penduduk				0	0		0	0	0	0	0	0				
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				83.999.800,00	83.999.800,00		83.999.800,00	83.999.800,00		83.999.800,00	83.999.800,00	83.999.800,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	3	3	83.999.800,00	3	83.999.800,00	3	83.999.800,00	3	83.999.800,00	3	83.999.800,00				
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	2		2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	8	8		8		8		8		8					
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				83.999.800,00	83.999.800,00		83.999.800,00	83.999.800,00		83.999.800,00	83.999.800,00	83.999.800,00				
Tersedianya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	8	8	83.999.800,00	8	83.999.800,00	8	83.999.800,00	8	83.999.800,00	8	83.999.800,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	TARGET (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)					
2.12.02.03.0005 - Sosialisasi Pendataan Penduduk	(02)	(03)		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			(15)			
Tersosialisasinya Pendataan Penduduk			0	2	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00					
2.12.02.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendataan Penduduk				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00						
Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendataan Penduduk		3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00					
2.12.02.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendataan Penduduk				14.475.500,00			14.475.500,00				14.475.500,00			14.475.500,00					
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendataan Penduduk		8	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00					
2.12.02.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk				14.475.500,00			14.475.500,00				14.475.500,00			14.475.500,00					
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendataan Penduduk		8	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00	8	14.475.500,00					
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				389.999.910,00			5.176.623.621,00				4.457.813.375,00			5.052.910.879,00					
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		100	100	389.999.910,00	100	5.176.623.621,00	100	5.176.623.621,00	100	4.931.509.725,00	100	5.052.910.879,00	100	5.052.910.879,00	2.130.000.000,01.00 00 - DIJAWAB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		95,42	96,50		97		97,50		98		98,50		98,50						
		56,63	57,30		57,80		58,30		59		60		60						
		62,79	63,20		63,40		63,70		63,90		64,20		64,20						
2.12.03.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				161.999.810,00			2.150.369.452,00				1.851.775.676,00			2.098.979.179,00					
Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		4	4	161.999.810,00	4	2.150.369.452,00	4	2.150.369.452,00	4	1.851.775.676,00	4	2.098.979.179,00	4	2.098.979.179,00					
		4	4		4		4		4		4		4						
		0	1		1		1		1		1		1						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026			2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)		TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
(01) 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberian Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	(02)	(03)		161.999.810,00		2.150.369.452,00		1.851.775.676,00		2.048.549.140,00		2.098.979.179,00		(14)	(15)	
Tersedianya Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberian Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)		4	4	161.999.810,00	4	2.150.369.452,00	4	1.851.775.676,00	4	2.048.549.140,00	4	2.098.979.179,00				
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil		4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00				
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00				
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				228.000.100,00		3.026.254.169,00		2.606.037.699,00		2.882.960.585,00		2.953.931.700,00				
Tersedianya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		5	5	228.000.100,00	5	3.026.254.169,00	6	2.606.037.699,00	7	2.882.960.585,00	8	2.953.931.700,00				
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)		10	10		10		11		12		13					
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)		15	15		15		17		19		21					
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)		0	1		1		1		1		1					
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				155.000.000,00		2.057.247.584,00		1.771.584.428,00		1.959.836.606,00		2.008.082.770,00				
Tersedianya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		10	10	155.000.000,00	10	2.057.247.584,00	11	1.771.584.428,00	12	1.959.836.606,00	13	2.008.082.770,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				73.000.100,00		969.006.585,00		834.453.271,00		923.123.979,00		945.848.930,00						
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5	5	5	73.000.100,00	5	969.006.585,00	6	834.453.271,00	7	923.123.979,00	8	945.848.930,00						
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil		15	15	0,00	15	0,00	17	0,00	19	0,00	21	0,00						
2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00						
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0		0		0		0		0						
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0		0		0		0		0						
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00		500.229.150,00						
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		6,51	8,5	500.229.150,00	10	500.229.150,00	11,5	500.229.150,00	13	500.229.150,00	15	500.229.150,00	2.12.08.00.00.00.01.00 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	3	7		9		11		13		15							
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				376.521.400,00		376.521.400,00		376.521.400,00		376.521.400,00		376.521.400,00						
Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10	10	10	376.521.400,00	10	376.521.400,00	10	376.521.400,00	10	376.521.400,00	10	376.521.400,00						
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12							
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				193.608.700,00		193.608.700,00		193.608.700,00		193.608.700,00		193.608.700,00						
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12	12	12	193.608.700,00	12	193.608.700,00	12	193.608.700,00	12	193.608.700,00	12	193.608.700,00						
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				182.912.700,00		182.912.700,00		182.912.700,00		182.912.700,00		182.912.700,00						
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	10	10	182.912.700,00	10	182.912.700,00	10	182.912.700,00	10	182.912.700,00	10	182.912.700,00						
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		0		0		0		0						
Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		0		0		0		0						



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)		(08)	(09)		(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
				72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2	2	72.392.750,00	2		72.392.750,00	2		72.392.750,00	2		72.392.750,00	2		72.392.750,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2		2			2			2			2				
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2		2			2			2			2				
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	12	12		12			12			12			12				
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00			72.392.750,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	12	12	72.392.750,00	12		72.392.750,00	12		72.392.750,00	12		72.392.750,00	12		72.392.750,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2	2	0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00	2		0,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Laporan)	0	1	51.315.000,00	1		51.315.000,00	1		51.315.000,00	1		51.315.000,00	1		51.315.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12	12		12			12			12			12				
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00			51.315.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)		(08)	(09)		(10)	(11)		(12)	(13)		(14)	(15)
Terkaitnya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12	12	51.315.000,00		12	51.315.000,00		12	51.315.000,00		12	51.315.000,00		12	51.315.000,00			
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0,00					0,00							0,00			
Terkaitnya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	0	1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00			
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	85.626.500,00		1	85.626.500,00		1	85.626.500,00		1	85.626.500,00		1	85.626.500,00		2.12.0.00.0.00.01.00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPL	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			
Terkaitnya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan KabupatenKota (Dokumen)	3	3	85.626.500,00		3	85.626.500,00		3	85.626.500,00		3	85.626.500,00		3	85.626.500,00			
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	12	12			12			12			12			12				
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan KabupatenKota				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
Tersedianya Data Kependudukan KabupatenKota	Jumlah Data Kependudukan KabupatenKota (Dokumen)	3	3	0,00		3	0,00		3	0,00		3	0,00		3	0,00			
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			85.626.500,00			
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	12	12	85.626.500,00		12	85.626.500,00		12	85.626.500,00		12	85.626.500,00		12	85.626.500,00			

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ini memuat rangkaian kegiatan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana pada Tabel 4.4 berikut.

Subkegiatan yang tercantum dalam Tabel 4.4 merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak identitas penduduk, serta penguatan tata kelola data kependudukan sebagai basis utama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan subkegiatan tersebut dilakukan melalui pemetaan keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
4.	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan 2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penetapan dan Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.5 sebagaimana berikut :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	A	A	A	A	A	
2	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai	75,00	75,94	76,88	77,81	78,75	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,10	3,20	3,20	3,50	3,70	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah indikator yang mengukur kinerja suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Penetapan dan target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan menggunakan Tabel 4.6 sebagaimana berikut :

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	64,50	65,00	68,00	70,00	72,00	
2	Perekaman KTP elektronik	%	98,30	98,50	98,80	99,00	99,30	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	
5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	57,00	57,30	57,80	58,30	58,30	
6	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraian nya dilaporkan	%	63,00	63,20	63,40	63,70	63,90	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	5	7	9	11	13	
8	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 ini merupakan wujud komitmen serta pedoman strategis bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Barito Selatan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam penyusunannya, telah dilakukan analisis situasi, penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang administrasi kependudukan melalui pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari internal perangkat daerah maupun dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif, dan mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Renstra ini agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Barito Selatan, demi mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029.

Barito Selatan,

2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan



Drs. SABIRIN, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199012 1 004